

LAKIP BKD

PROVINSI JAWA BARAT



LKIP

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



2023



#bangga
melayani BerAKHLAK
#bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7E5EB97FB7>



7E5EB97FB7

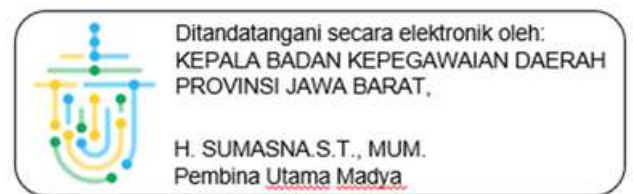
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ini merupakan perwujudan atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2023, Laporan Kinerja ini merupakan Tahun Terakhir dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2023

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran unit dan peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Badan Kepegawaian Daerah secara keseluruhan dan mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

BANDUNG, 3 JANUARI 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://aidebar.jabarprov.go.id/v/7E5EB97FB7>

7E5EB97FB7

DAFTAR ISI

**BAB 1
PENDAHULUAN**

1

**BAB 2
PERENCANAAN KINERJA**

2

**BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA**

16

**BAB 4
PENUTUP**

25



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7E5EB97FB7>

7E5EB97FB7

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Rencana Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat 2024-2026, Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. LKIP tingkat Perangkat Daerah disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7E5EB97FB7>

7E5EB97FB7

Jawa Barat selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan LKIP yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antar target dan realisasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

2. Cascading Kinerja Badan Kepegawaian Daerah

Selaras dengan paradigma organisasi berbasis kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

Gambar 1.1.

Cascading Kinerja Badan Kepegawaian Daerah

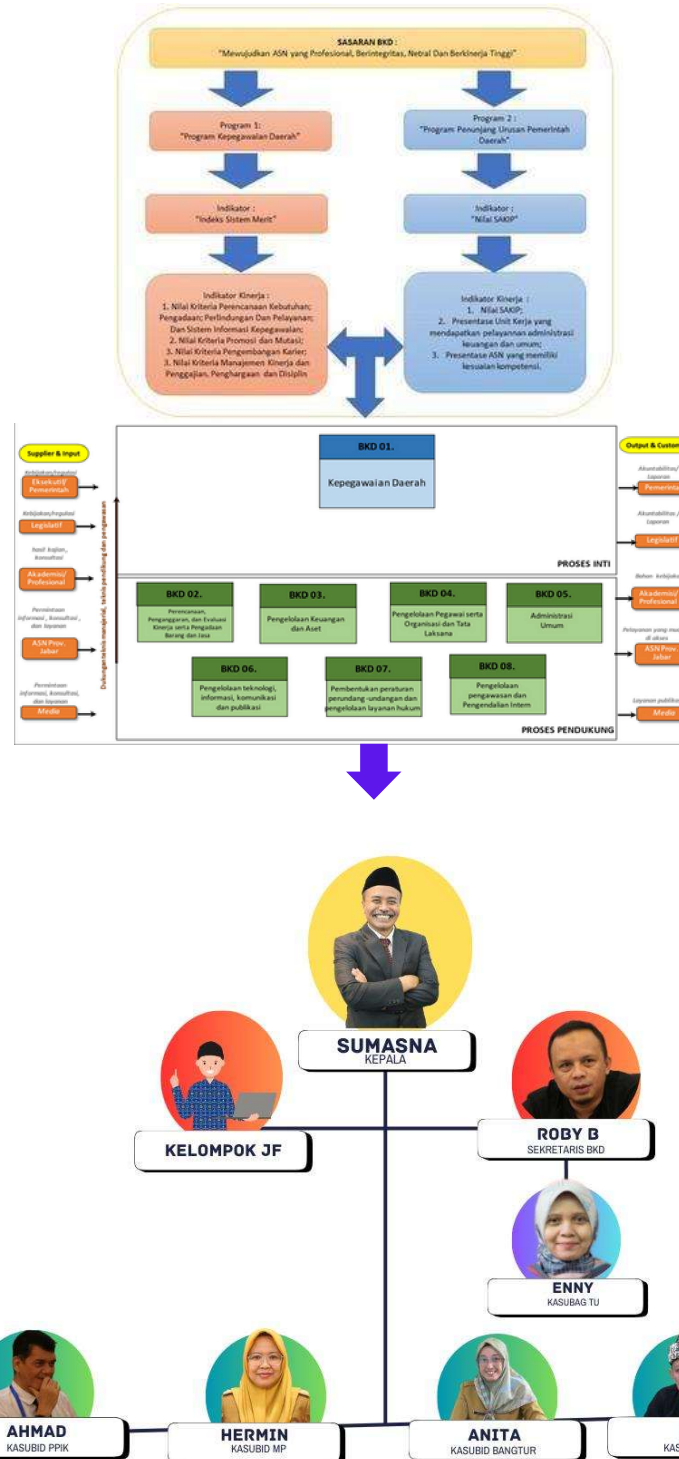


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7E5EB97FB7>

Hubungan antara mandat kinerja, Peta Proses Bisnis dan design Struktur Organisasi BadanKepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :

Gambar 1.2
Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi BKD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v7E5EB97FB7>

3. Kelembagaan

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Kelembagaan itu sendiri menyangkut beberapa aspek, antara lain: aspek organisasi, sumber daya manusia serta pendanaan.

4.1 Aspek Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola kepegawaian daerah dalam sistem pemerintahan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tugas harus dijalankan oleh BKD Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan Kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan Kepegawaian Daerah; dan Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat juga mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian meliputi pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian,



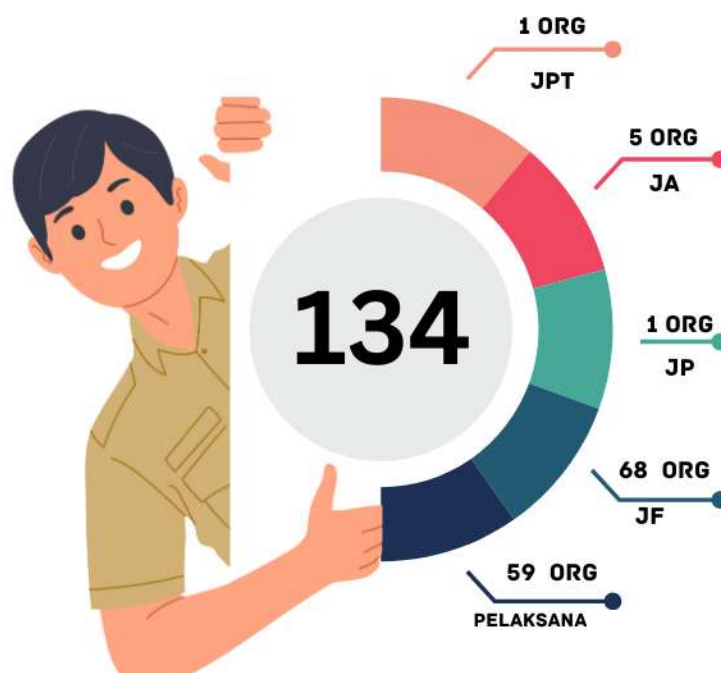
7E5EB97FB7

mutasi dan promosi, pengembangan aparatur serta penilaian kinerja aparatur dan penghargaan yang menjadi kewenangan provinsi melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk sekretariat Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2 Aspek Sumber Daya

BKD Provinsi Jawa Barat didukung oleh 134 Pegawai yang terbagi berdasarkan lokasi kerja seperti terlihat pada gambar 1.3 di bawah ini. Jumlah tersebut dialokasikan untuk memberikan layanan kepada seluruh pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 46.458 yang terdiri dari PNS 30.164 dan PPPK sebanyak 16.294 Per Desember 2023 sesuai data Siap Jabar.

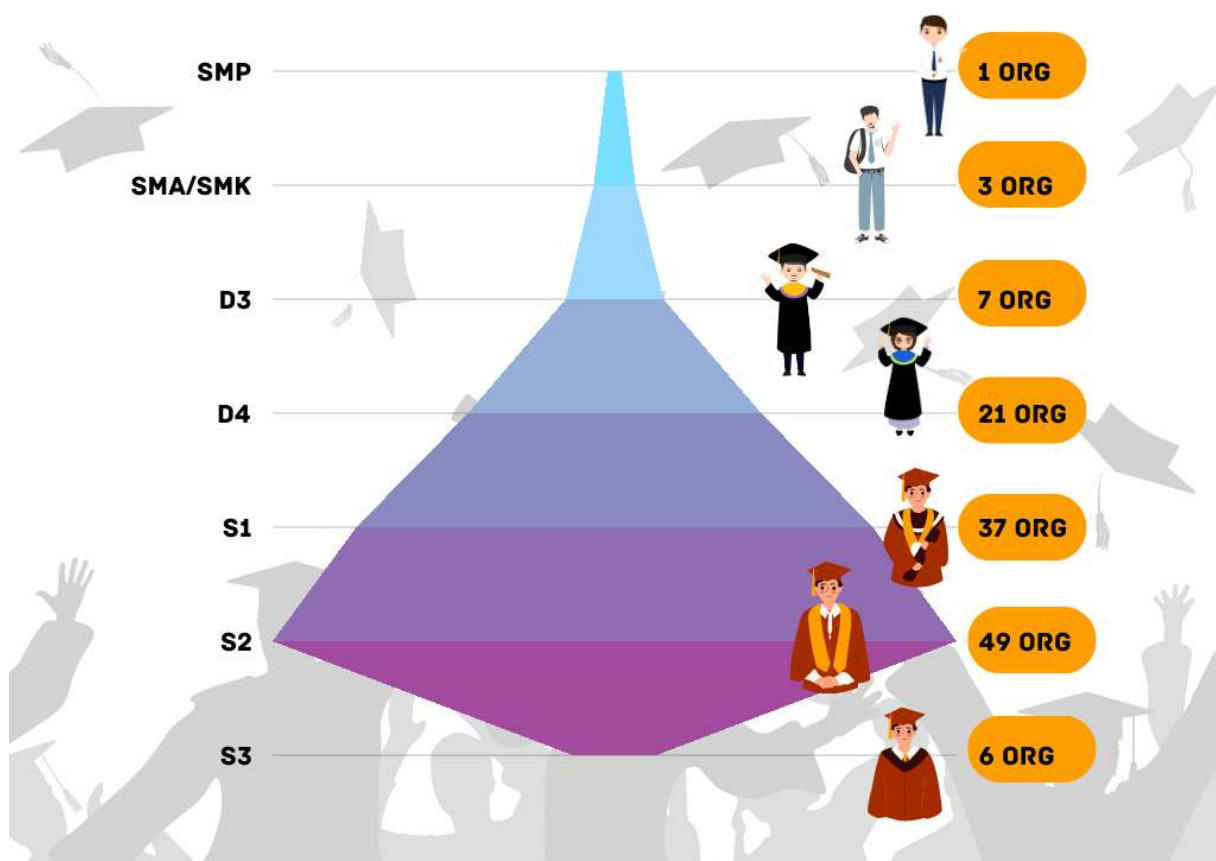
Gambar 1.3
Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Jabatan



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BKD Provinsi Jawa Barat didukung oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan mayoritas Sarjana Strata I (S1) dan Sarjana Strata II (S2) dari berbagai jurusan sebanyak 86 pegawai, diikuti oleh pegawai D.III/D IV sebanyak 28 orang, SMA sebanyak 3 orang, S3 sebanyak 6 orang, SMP sebanyak 1 orang. Kondisi tersebut terlihat dalam gambar berikut :

Gambar 1.4

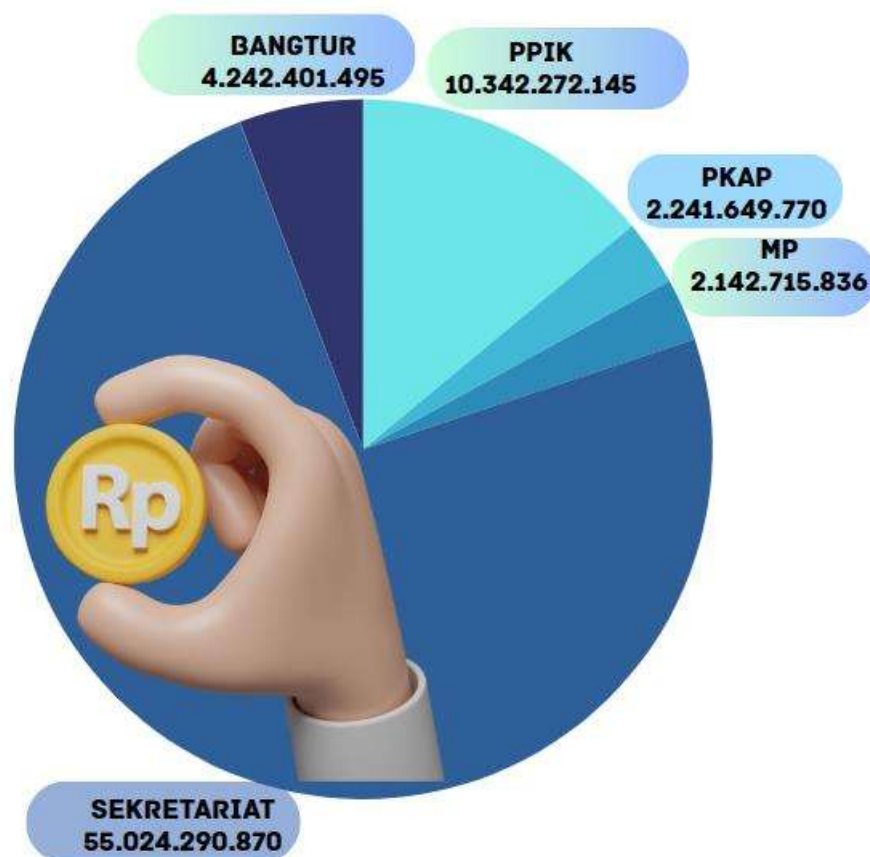
Komposisi Pegawai BKD Berdasarkan Pendidikan



4.3 Aspek Pendanaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2023 BKD Provinsi Jawa Barat didukung oleh anggaran Belanja yang bersumber dari APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 73.993.330.116,-. Adapun untuk alokasi anggaran masing - masing unit kerja BKD dapat dilihat pada Tabel 1.5. realisasi anggaran Belanja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran sebesar Rp 68.186.091.877 ,- atau sebesar **92,15 %** seperti terlihat di bawah ini :

Gambar 1.5
Alokasi Anggaran Belanja BKD Tahun 2023

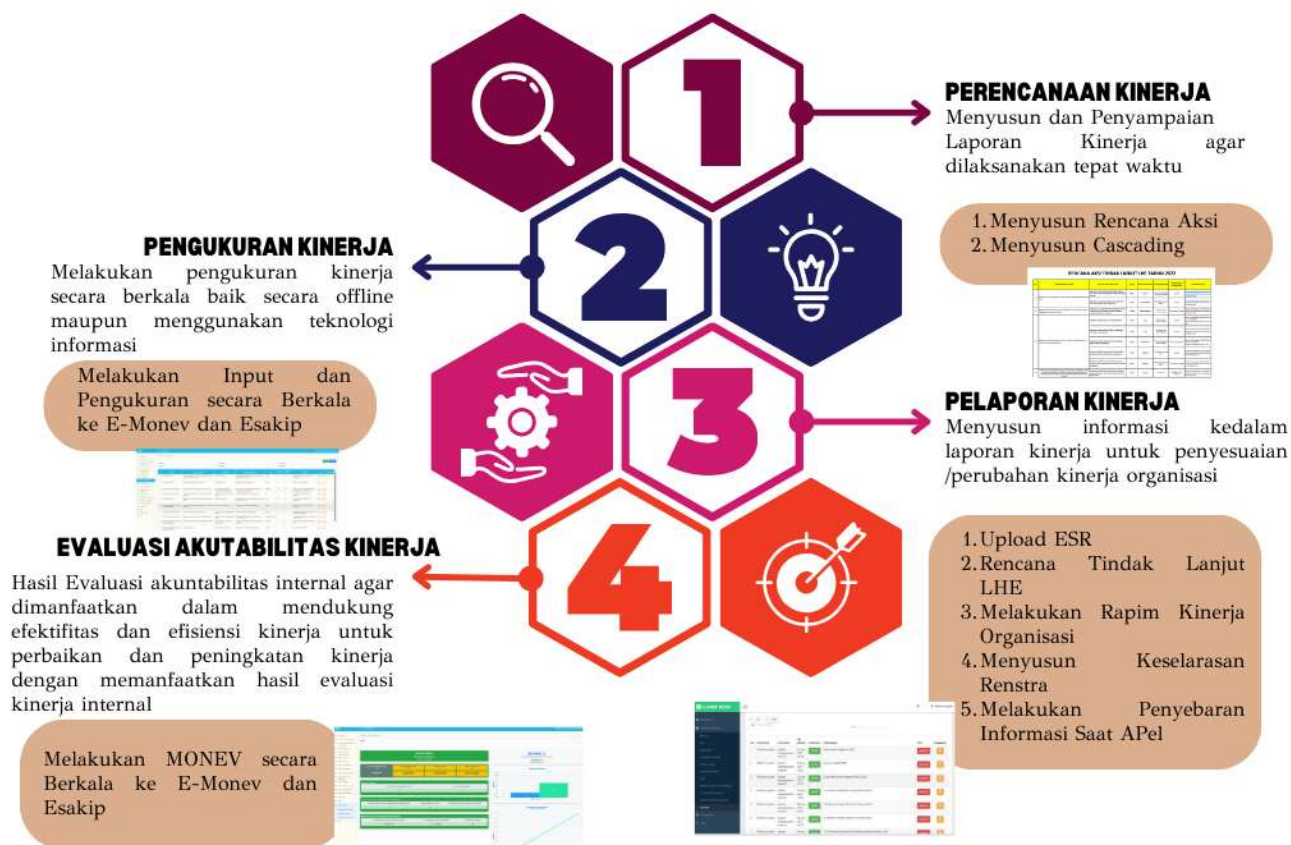


4. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Berdasarkan Surat Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 244/PW.02.02/Irban I tanggal 30 Agustus 2022 tentang Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat disampaikan rekomendasi dan tindak lanjut sebagai berikut :

Gambar 1.6

REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT LKIP 2022



7E5EB97FB7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7E5EB97FB7>

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada. Analisa terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Selanjutnya, renstra beserta rencana dan capaian target kinerja BKD Provinsi Jawa barat Tahun 2023 diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mendukung visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 guna mewujudkan rencana strategis PD yang merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

❖ Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 yaitu **“TERWUJUDNYA JABAR JUARA LAHIR BATIN, DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI”**.



❖ Misi

Visi tersebut dilaksanakan melalui Misi sebagai berikut :

1. Membentuk Manusia PANCASILA yang Bertaqwa, untuk Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Pada Tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Tahun 2018-2023 guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah 2018-2023 adalah :

“Mewujudkan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN”



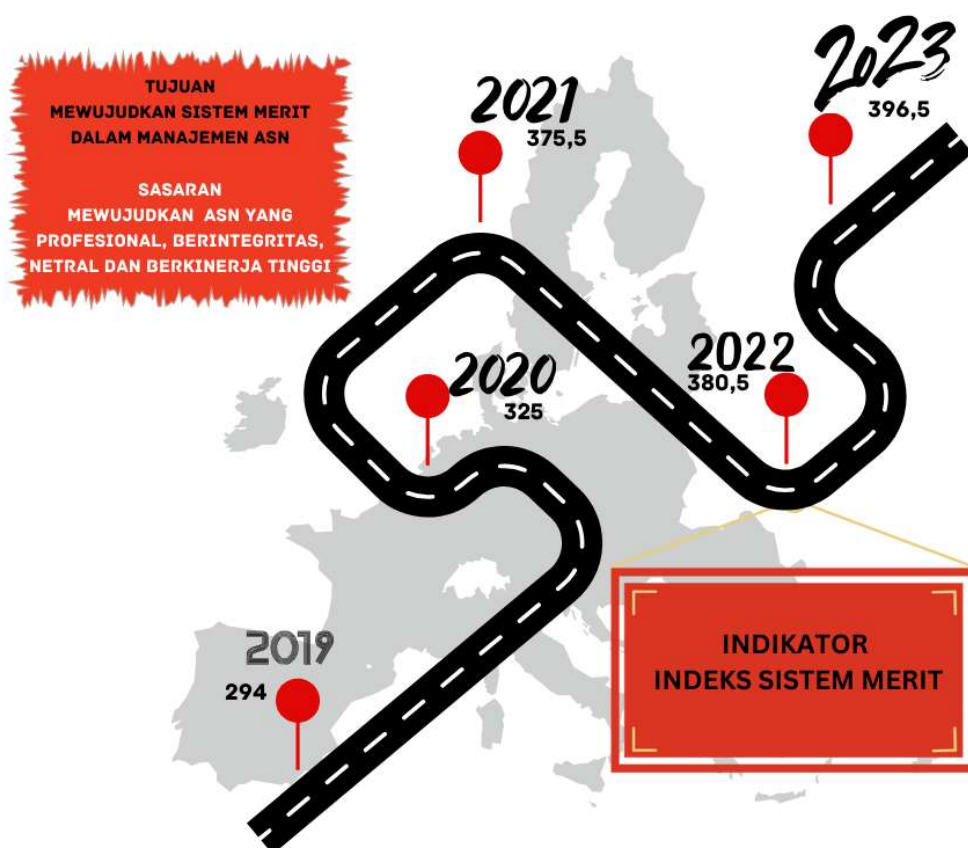
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7E5EB97FB7>

7E5EB97FB7

Adapun Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat adalah: **“Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral dan Berkinerja Tinggi”**

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran, dan indikator, serta capaian targetnya diuraikandalam tabel berikut dibawah ini :

GAMBAR 2.1
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR JANGKA MENENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN 2018-2023



2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh BKD Provinsi Jawa Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan, perlu mempertimbangkan



7E5EB97FB7

kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh. Strategi dan arah kebijakan tersebut diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral dan Berkinerja Tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan UPTD Center Of Excelence (COE) 2. Penerapan Kebijakan Manajemen Talenta. 3. Pembangunan Aplikasi IDCP Untuk Pengembangan Pola Karier ASN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dasar hukum UPTD Center Of Excelence (COE) ; 2. Pelaksanaan pemetaan kompetensi untuk seluruh pegawai secara bertahap; 3. Pemetaan Kompetensi pegawai untuk "The right man on the right place". 4. Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pola Karier ASN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi Sistem Kepegawaian Provinsi dengan Sistem Pusat dan Kab/Kota 2. Pembangunan <i>Big Data</i> Kepegawaian 3. Transfer sistem informasi <i>government</i> ke Kabupaten/Kota 4. Pengembangan fitur layanan kepegawaian berbasis elektronik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi penerapan <i>e-office</i>; 2. Penyusunan Kebijakan Simpeg berbasis <i>online</i> yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai; 3. Integrasi 2 arah data Simpeg (SIAP Jabar) dengan data SAPK BKN dan data kepegawaian Kabupaten/Kota.



7E5EB97FB7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v7E5EB97FB7>

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah perencanaan kinerja tahunan (annual performance plan). Rencana kinerja tahunan ini merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk satutahun perencanaan.

Dalam rencana kinerja tahunan ditetapkan sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya. Rencana Kinerja Tahunan BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

GAMBAR 2.2
IKU BKD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2023



Rencana kinerja di atas menjabarkan target kinerja yang harus dicapai BKD Provinsi Jawa barat dalam tahun 2023. Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada indikator kinerja, yang juga berfungsi sebagai pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.



7E5EB97FB7

2.3 Struktur Program dan Kegiatan 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jawa Barat pada Tahun 2022, maupun program dan kegiatan pendukung lainnya diuraikan dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.2
Struktur Program dan kegiatan
Badan Kepegawaian Daerah 2023

Sasaran	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran	
Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral dan Berkinerja Tinggi	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 55,024,290,870	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 325,720,504	
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 42,466,663,221	
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2,080,684,750	
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1,759,999,093	
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 3,745,791,824	
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4,644,431,478	
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp. 18,969,039,246	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp. 10,342,272,145	
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Rp. 2,142,175,836	
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp. 4,242,401,495	
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp. 2,241,649,770	
	Total Keseluruhan			Rp. 73,993,330,116



7E5EB97FB7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7E5EB97FB7>

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya pada Tahun 2023 telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja untuk mewujudkan target kinerja pada Tahun 2023.

GAMBAR 3.3
Penandatanganan Perjanjian Kinerja



7E5EB97FB7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/w7E5EB97FB7>

BAB III

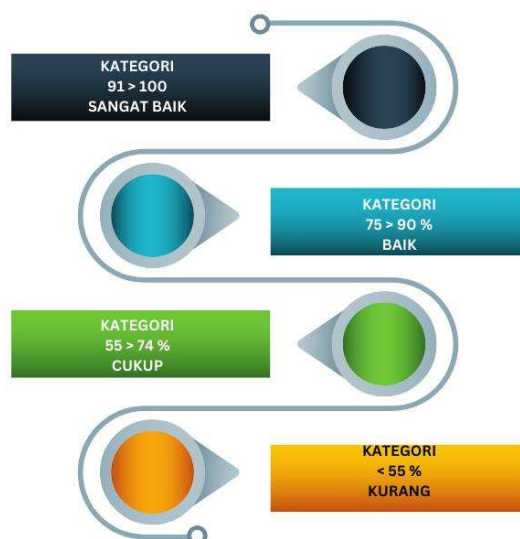
AKUNTABILITAS KINERJA

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1

Pengukuran Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

SKALA PENGUKURAN LKIP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7E5EB97FB7>

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Berdasarkan pedoman di atas, pencapaian target kinerja BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2023 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja antara Kepala BKD Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat. Pengukuran antara rencana kinerja yang terdapat dalam bab sebelumnya terhadap realisasinya diuraikan dalam tabel berikut :

Gambar 3.2
Capaian Kinerja



Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 yang diukur berdasarkan 1

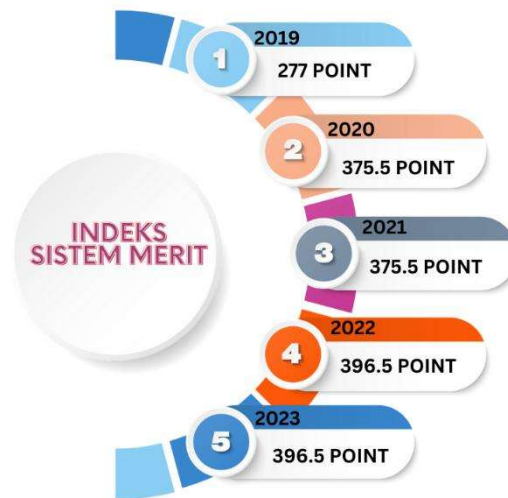


7E5EB97FB7

(satu) sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai sebesar **100 %**, maka capaian kinerja dikategorikan “**Sangat Baik**”.

Dalam melakukan analisa terhadap capaian Indeks Sistem Merit pada Tahun 2023, dibawah ini akan disebutkan beberapa hal terkait pencapaian Indeks Sistem Merit Tahun 2023;

Gambar 3.2
Perbandingan Capaian Sistem Merit dari 2019
Sampai dengan 2023 Badan Kepegawaian Daerah



a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

Pada Tahun 2023, BKD Provinsi Jawa Barat menargetkan capaian atas Indeks Sistem Merit sebesar 396,5 poin. Adapun dari hasil penilaian yang dilakukan oleh KASN, dengan menggunakan Perka KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah diperoleh nilai Indeks Sistem Merit Provinsi Jawa Barat sebesar 396,5 Poin dengan kategori “sangat baik” sehingga capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3.3
Rincian Pencapaian Per Aspek
Indeks Sistem Merit Tahun 2023



b. Perbandingan capaian dan realisasi Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Realisasi Indeks Sistem Merit Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2022, dapat dilihat dalam tabel 3.4 sebagai berikut:

Gambar 3.4
Perbandingan Capaian dan Realisasi Indeks Sistem Merit Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun Sebelumnya



- ◆ Apabila disandingkan capaian 2023 dengan 2022, indeks system merit tidak mengalami Peningkatan ataupun penurunan Realisasi yaitu dari realisasi 2023 sebesar 396,5 Point dan 2022 sebesar 396,5 point. Begitu pula pada aspek



7E5EB97FB7

capaian kinerja indeks system merit tidak mengalami Peningkatan ataupun penurunan yaitu dari capaian kinerja 2023 sebesar 100 % dan 2022 sebesar 100 %.

Indeks suster merit tidak mengalami peningkatan atau penurunan karena penilaian Sistem Merit Sendiri dinilai oleh KASN Per 2 (dua) Tahun Sekali.

C. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA Tahun 2023.

Perbandingan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama BKD Provinsi Jawa Barat melalui Indeks Sistem Merit pada Tahun 2023 dengan target akhir yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan Realisasi Indeks Sistem Merit Tahun 2023
dengan Target Akhir RENSTRA Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018 – 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SATUAN	REALISASI	TARGET AKHIR RENSTR A	CAPAIAN TERHADAP RENSTRA
Terselenggaranya Penerapan Sistem Merit	Indikator: Indeks Sistem Merit Meta Indikator : Indikator SasaranPD Tahun yang dicapai/ Indikator sasaran RENSTRA x 100%	Point	396.5	396,5	100 %

Berdasarkan tabel di atas, bahwa perbandingan Indeks Sistem Merit Tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA pada Tahun 2023 sebesar 100 % yaitu dari target Renstra sebesar 396,5 terealisasi sebesar 396,5 Point..

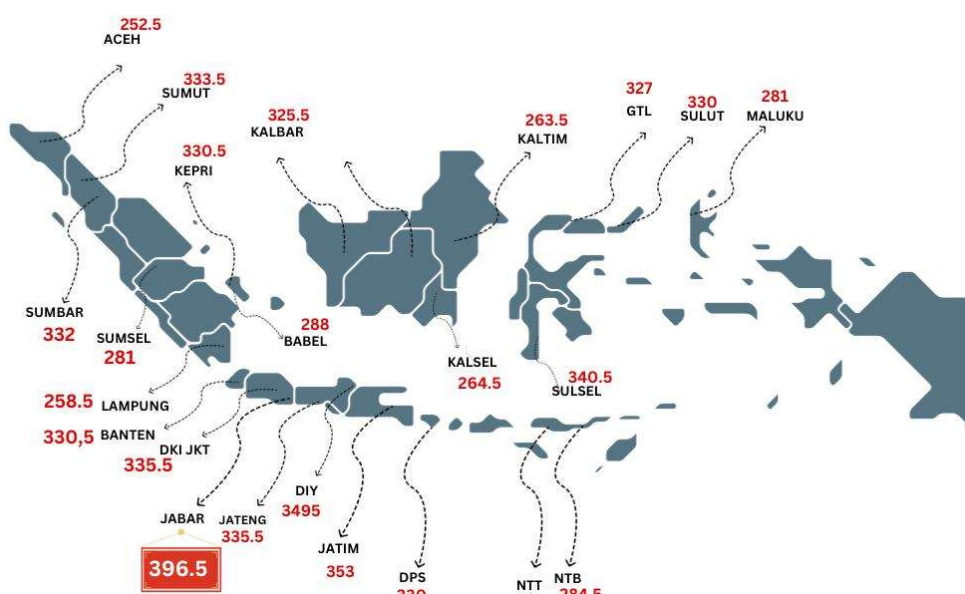


7E5EB97FB7

d. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Dalam pencapaian pada Tahun 2022, perolehan Indeks Sistem Merit Provinsi Jawa Barat apabila dibandingkan dengan Provinsi lainnya menunjukkan hasil tertinggi se Indonesia atau menjadi Provinsi dengan nilai Indeks Sistem Merit tertinggi se-Indonesia dengan rata-rata nasional 289,6 Point. Nilai provinsi jawa barat sebesar 106,9 diatas rata rata nilai nasional, Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 3.6.

GAMBAR 3.6
PERBANDINGAN REALISASI INDEKS SISTEM MERIT PROV JABAR 2023
DENGAN PROVINSI LAIN



e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Capaian Indeks Sistem Merit didukung oleh Promosi dan Mutasi berdasarkan system merit. Hal ini ditandai dengan nilai kriteria promosi dan mutasi sebesar 80 Point. Promosi dan Mutasi berdasarkan system merit terwujud karena tersusunnya dokumen rekomendasi pengusulan JPT dan JA Kab/Kota sebanyak 27 kab/kota, tersusunnya dokumen rekomendasi pengangkatan dalam jabatan kab/kota sebanyak 60 dokumen, selain itu tersusunnya kebijakan mutase pegawai melalui mekanisme akuisisi talenta eksternal talent scouting sebesar 1 Laporan, ditandai dengan kebijakan mutasi pegawai melalui talent scouting eskternal sebanyak1 laporan, tersusunnya kebijakan regulasi peraturan daerah manajemen asn dengan menyiapkan dokumen



7E5EB97FB7

regulasi peraturan manajemen asn sebanyak 1 dokumen , terseleksi asn masuk provinsi jawa barat melalui akuisisi talenta dengan menyeleksi mutasi asn masuk provinsi jawa barat melalui akuisisi talenta sebanyak 1 Laporan, tersusunnya grand design aplikasi E-PMK, Tersedianya Layanan kenaikan Pangkat ASN di lingkungan Kab/Kota ditandai dengan ASN yang mendapatkan layanan kenaikan pangkat sebanyak 1 laporan. Terseleksi asn melalui fit and proper test untuk kenaikan kelas jabatan pelaksana sebanyak 2 laporan. selain itu tersusunnya evidence system merit dengan menyiapkan bahan penilaian/evidence system merit.

Capaian Indeks Sistem Merit juga didukung oleh Meningkatnya kualitas pengembangan karir asn yang berdasarkan system merit dengan nilai kriteria pengembangan karir Hal ini ditandai dengan nilai pengembangan karir sebesar 40 Point. Meningkatnya kualitas pengembangan karir asn terjadi karena tersedianya laporan fasilitasi pengembangan karir asn pemerintah provinsi jawa barat dalam jabatan fungsional dengan menyiapkan fasilitasi pengembangan karir asn provinsi jawa barat dalam jabatan fungsional sebanyak 6 laporan, tersedianya dokumen pengembangan aplikasi system jawara jabatan fungsional dengan menyiapkan dokumen pengembangan aplikasi sim jawara fungsional sebanyak 6 laporan, tersedianya rekomendasi sertifikasi jabatan fungsional dengan merekomendasikan fasilitasi sertifikasi jabatan fungsional, tersusunnya instrument kompetensi teknis bagi pejabat fungsional dengan Menyusun soal kompetensi aparatur, terlatihnya JPT dan JA dengan hasil jumlah JPT dan JA yang terlatih sebanyak 6 dokumen, tersedianya Assessment center dengan melayani asn yang mendapatkan pelayanan assesment sebanyak 8000 orang, tersertifikasinya jabatan ASN dengan jumlah asn yang tersertifikasi jabatan sebanyak 100 Orang, terlatihnya jabatan fungsional dengan JF yang terlatih sebanyak 100 orang, tersusunnya kebijakan Agen Perubahan dengan Menyusun kebijakan agen perubahan sebanyak 1 kepgub, terfasilitasinya JPT dan JA dalam Pendidikan lanjutan, JPT dan JA yang mendapatkan fasilitasi



Pendidikan lanjutan sebanyak 100 orang.

Selain itu, Capaian Indeks Sistem Merit didukung oleh Manajemen Kinerja ASN dan Penggajian berdasarkan system merit Hal ini ditandai dengan nilai manajemen kinerja asn sebesar 120 Point. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja asn terjadi karena tersedianya ditandai dengan terbangunnya fitur pengelolaan team kerja pada aplikasi TRK dengan membangun fitur baru pada aplikasi TRK sebanyak 1 fitur, Menyusun peraturan gubernur tentang pengelolaan kinerja ASN sesuai dengan kaidah pengelolaan kinerja asn yang berlaku sebanyak 1 dokumen, terseleksinya ASN yang berprestasi dengan memberikan penghargaan pada pns yang berprestasi sebanyak 1 laporan, tersosialisasikannya penyusunan SKP kepada seluruh ASN dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh asn sebanyak 38 perangkat daerah, terlayannya izin cuti dan calon kepala desa dengan memberikan layanan izin cuti sebanyak 100 % terlayani, seluruh perangkat daerah mmendapatkan penilaian kinerja dengan melakukan dialog kinerja bagi seluruh asn sebanyak 38 perangkat daerah. Tersusunnya kebijakan tentang pengelolaan tanda kehormatan SLKS dengan membuat perka BKD tentang pedoman pengelolaan tanda kehormatan sebanyak 1 perka, tersedianya data terkait penegakan disiplin pelanggaran kode etik dan kode prilaku yang terintegrasi dengan sapk BKN sebanyak 1 laporan, terseleksinya pegawai berkinerja terbaik bulanan (EOTM) dengan memberikan penilaian terbaik bagi asn yang berkinerja terbaik sebanyak 150 orang, terseleksinya pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur dengan mengusulkan PNS calon penerima penghargaan dan tanda jasa aparatur sebanyak 100% terlayani, terseleksinya PNS dalam pemberian penghargaan daerah lainnya dengan mengusulkan PNS mendapatkan piagam penghargaan daerah lainnya sebanyak 100 persen terlayani, Terbangunnya fitur perceraian pada aplikasi e-disiplin dengan membuat fitur baru e-disiplin sebanyak 1 fitur, tersusunnya kebijakan pengusulan kenaikan pangkat luar biasa PNS dengan membuat kebijakan pengelolaan dan pengusulan kenaikan pangkat luar biasa sebanyak 3 pergub, Menyusun pergub kinerja, pelanggaran hukuman disiplin yang tertangani



hasil pelayanan disiplin yang terlayani sebanyak 1 pergub, tersedianya fitur early warning system untuk cuti sakit dan CLTN dengan membuat fitur baru pada aplikasi edisiplin sebanyak 1 laporan.

Dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Sistem Merit, BKD meningkatkan kualitas perencanaan, kebutuhan asn, perlindungan dan pelayanan ASN dengan nilai perencanaan, kebutuhan asn, perlindungan dan pelayanan ASN sebesar 120 Point. Meningkatnya kualitas perencanaan, kebutuhan asn, perlindungan dan pelayanan ASN terjadi karena terpantaunya perangkat daerah tentang presensi dengan memantau presensi perangkat daerah sebanyak 1 laporan, tersedianya roadmap kebutuhan ASN 5 (lima) tahunan yang ditetapkan oleh PPK dengan menghasilkan roadmap kebutuhan asn sebanyak 1 dokumen, tersusunnya kajian telahaan arsip layanan kepegawaian dengan membuat kajian telahaan arsip sebanyak 1 laporan, tersedianya layanan kesejahteraan pegawai dengan pegawai diberikan layanan kesejahteraan sebanyak 12 kegiatan, tersedianya database kepegawaian yang diperbaharui secara berkala sebanyak 1 laporan, berpartisipasi ASN Pemprov Jabar dalam kegiatan pornas sebanyak 1 laporan, terbina asn MPU tentang kewirausahaan sebanyak 8 laporan, tersusunnya rekomendasi BLUD perangkat daerah dengan membuat rekomendasi BLUD Perangkat daerah sebanyak 1 dokumen, terintegrasinya aplikasi siap Jabar dengan super aplikasi kepegawaian sebanyak 1 laporan, tersedianya layanan hukum bagi asn dengan memberikan layanan hukum bagi asn sebanyak 12 laporan, tersusunnya dokumen administrasi pengadaan casn dengan Menyusun dokumen adm pengadaan sebanyak 1 dokumen, terbangunnya fitur cuti dan EWS pada aplikasi presensi dengan membuat fitur baru sebanyak 1 laporan, tersedianya layanan tapera PNS dengan memberikan layanan Tapera sebanyak 12 laporan, tersusunnya kebijakan tentang manajemen data kepegawaian dengan Menyusun kebijakan manajemen data kepegawaian sebanyak 1 pergub, tersedianya penetapan Keputusan pensiun pns yang tepat waktu melalui penetapan pension sebanyak 12 laporan, terpeliharanya system informasi kepegawaian dengan memelihara system informasi kepegawaian sebanyak 1 laporan. Tersusunnya peta kebutuhan ASN dengan membuat



peta kebutuhan sebanyak 4 dokumen, tersedianya kegiatan korpri dengan melakukan kegiatan korpri sebanyak 2 kegiatan, tersusunnya data pns yang akan pensiun dengan menyiapkan data pns pensiun sebanyak 4 dokumen, terbangunnya aplikasi tryout casn juara dengan membuat aplikasi tryout sebanyak 1 laporan. tersusunnya eformasi dengan membuat proses bisnis grand design e formasi sebanyak 1 dokumen, tersusunnya rencana pengadaan casn tahun berjalan dengan membuat rencana pengadaan tahun berjalan sebanyak 1 laporan.

Upaya peningkatan kinerja Indeks Sistem Merit yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 antara lain

1. memperbaiki target kinerja Indikator indeks Sistem Merit pada Tahun 2024. Realisasi indikator Indeks Sistem Merit pada Tahun 2023 sebesar 1 poin terdapat selisih dengan Target kinerja indikator Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2024 sebesar 1 poin pada dokumen renstra. Dengan demikian, target kinerja Tahun 2024 harus diperbaiki yang semula 396,5 poin menjadi 397,5 poin.
2. Memperbaiki strategi dan aktivitas pada Tahun 2024 sebagai berikut :

Outcome/output		Keterangan
Tahun 2023	Perbaikan Rencana Tahun 2024 Rekomendasi LKIP	
Meningkatnya kualitas perencanaan, kebutuhan asn, perlindungan dan pelayanan ASN; (Nilai Kriteria Perencanaan kebutuhan, pengadaan, perlindungan dan pelayanan system informasi kepegawaian)	Meningkatnya Pemanfaatan system informasi (Persentase Layanan kepegawaian yang memanfaatkan system informasi)	
	Rencana Kebutuhan ASN sesuai dengan kebutuhan Kinerja (Persentase rencana kebutuhan yang sesuai dengan roadmap kebutuhan asn)	
	Pengadaan Pegawai sesuai dengan kebutuhan kinerja (Persentase CPNS dan PPPK yang terseleksi sesuai dengan formasi)	
	Pelayanan Pegawai Sesuai dengan Aturan (Persentase permohonan pelayanan kepegawaian yang sesuai dengan standar)	
	Pelayanan Penggajian, penghargaan dan disiplin sesuai tata Kelola meritokrasi	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7E5EB97FB7>

7E5EB97FB7

Manajemen Kinerja ASN dan Penggajian berdasarkan system merit; (Nilai Kriteria manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin)	(Persentase permohonan pelayanan penggajian, penghargaan dan disiplin yang tertangani sesuai standar)	
	Riview dan evaluasi kinerja individu berdampak pada peningkatan kinerja pegawai (Nilai Rata-rata kinerja pegawai)	
Meningkatnya kualitas pengembangan karir asn yang berdasarkan system merit. (Nilai Kriteria Pengembangan Karir)	Meningkatnya kompetensi jabatan Fungsional (Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi jabatan fungsional)	
	Meningkatnya kompetensi Manajerial (Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial)	
	Meningkatnya pemanfaatan data profil dalam pengembangan karir (Persentase data profil yang dimanfaatkan dalam pengembangan karir)	
	Meningkatnya kualitas pelayanan karir jabatan fungsional (Persentase permohonan pelayanan pengembangan jabatan fungsional yang tertangani sesuai standar)	
Promosi dan mutasi berdasarkan system merit. (Nilai Kriteria Mutasi dan Promosi)	Promosi dan Mutasi berdasarkan, kompetensi, kualifikasi dan kinerja (Persentase ASN yang mendapatkan promosi dan mutase berdasarkan manajemen talenta)	

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pada Tahun 2023 dalam penerapan sistem merit di Provinsi Jawa Barat, BKD Provinsi Jawa Barat didukung oleh 2 program dan 10 kegiatan. Program yang mendukung penerapan sistem merit adalah program pengembangan karier serta kegiatan yang mendukung penerapan sistem merit antara lain: kegiatan manajemen talenta pegawai, kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja pegawai, dan kegiatan penataan dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian, Mutasi Promosi serta Perencanaan Kebutuhan ASN.

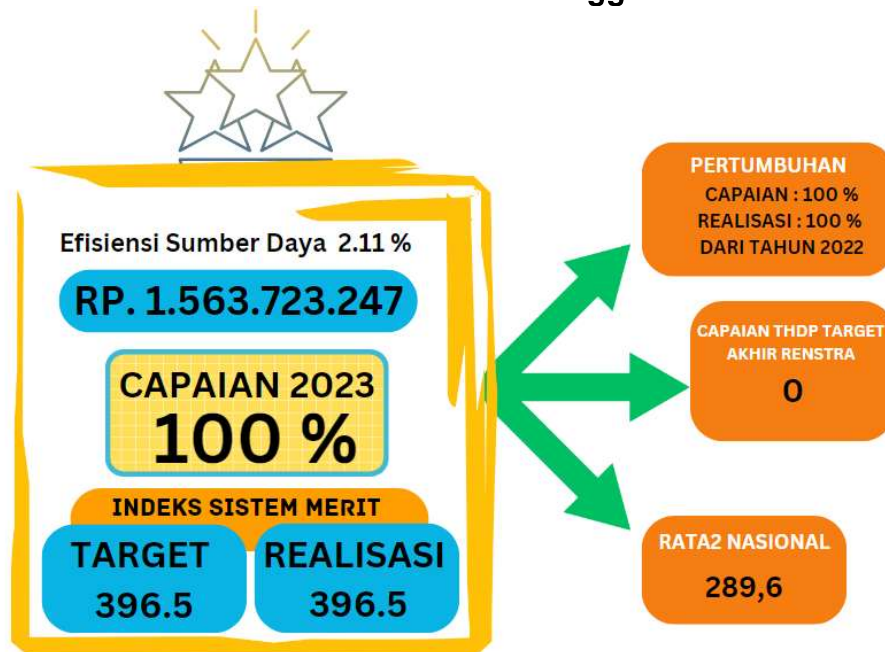


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7E5EB97FB7>

f. Efisiensi Anggaran

Gambar 3.7
Efisiensi Anggaran



Berdasarkan Gambar 3.7 bahwa realisasi anggaran tahun 2022 terdapat penyerapan anggaran sebanyak 97,89%. Adanya Kenaikan Penyerapan anggaran dari capaian Tahun 2022 86.61 % dengan kenaikan sebesar 11,28 %, Indeks Kinerja Utama (IKU) Sistem Merit Tahun 2023 tercapai 100% dengan Penggunaan Anggaran 72.429.597.869,- Adapun efisiensi capaian anggaran adalah sebesar **2.11 %** atau setara **Rp. 1.563.732.247**.



7E5EB97FB7

3.2 Realisasi Anggaran

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 73.993.330.116,- yang digunakan untuk melaksanakan 2 program dan 10 kegiatan. Secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi
1	Belanja Pegawai	42,345,057,076	41, 739,577,486	98.57%
2	Belanja Barang Jasa	26,798,080,074	26,114,659,064	97.45%
3	Belanja Modal	4,850,192,298	4,586,981,778	94.57%
Jumlah		73,993,330,116	72,429,597,869	97.89%

Berdasarkan informasi pada tabel 3.2. bahwa dari total pagu anggaran, Rp. 73,993,330,116,-belanja pegawai setelah perubahan APBD Tahun 2023 dapat terealisasi sebesar Rp. 72,429,597,869,- atau dengan capaian realisasi sebesar 97,89 %. Persentase penyerapan belanja langsung pada Tahun 2023 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan penyerapan belanja langsung Tahun 2022 dengan tingkat persentase 86,61%.

Adapun beberapa kendala yang menyebabkan realisasi beberapa kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2023 belum optimal adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Gaji dan Tunjangan bagi ASN dengan capaian 98,57 % karena Bersifat Penyediaan.

2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Sub Kegiatan Belanja Tugas Belajar dengan capaian 87.60 % bersifat penyediaan anggaran bagi ASN yang akan melaksanakan Tugas Belajar S1, S2, dan S3.



7E5EB97FB7

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan dimaksud, meliputi program dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kepegawaian daerah, mulai dari perencanaan, pengadaan pegawai, formasi dan pengembangan pegawai, perpindahan pegawai, pendistribusian dan kegiatan lainnya diwujudkan kedalam indikator kinerja.

Laporan Kinerja BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2023 ini menyajikan berbagai keberhasilan kinerja capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh BKD Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.



4.2. Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa saran serta rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebaiknya penyusunan rencana kerja sesuai dengan program dan kegiatan disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia (baik SDM maupun alokasi anggaran), dengan membuat Langkah-langkah yang kongrit dalam menentukan target kinerja dan anggaran yang terukur..
2. Meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait (terutama dengan instansi pusat), mengingat adanya beberapa kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat yang terkait langsung dengan instansi pusat, seperti Pengadaan CPNS, Kenaikan Pangkat dan Pensiun.



LAMPIRAN



7E5EB97FB7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7E5EB97FB7>

DATA CAPAIAN KINERJA BKD PROVINSI JAWA BARAT 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Konsep	P1		P2		P3		P4			P5			P6			P7						
			Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian 2023	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Tahun 2022	Peringkat atau Perolehan Capaian 2022	Peringkat atau Perolehan Capaian 2022	Target Akhir RPKM D (Tahun 2023)	Realisasi 2022 terhadap Target RAKA Tahun 2023	Rata-rata Rata-rata Nasional	Peringkat Glava Barat di Level Pulau Jawa	Peringkat Glava Barat di Level Nasional	Indikator Sasaran Program Yang Terkait	Targe (2022)		Realisasi (2022)	Capaian	Nama Program/Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selish Anggaran	Capaian Efisiensi
MIS15				%		%		Sumber : RAKA										%					%	
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF DAN KEPIMPINAN YANG KOLABORATIF ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA																								
MEWUJUDKAN ASN YANG PROFESIONAL, BERINTEGRITAS, NETRAL DAN BERKINERJA TINGGI																								
1	Indeks Sistem Merit	Memapkan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk membangun SDM Aparatur dan mewujudkan pegawai ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi, dimana dikur dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, pengujian penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi	396,5	396,5	100	380,5	396,5	104,5	0	0	390,00	102%	289,6	137	1	1	A	A	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	55.024.290,870	54.025.928,583	986.741,828	1,79
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					
																			100					